

## **ABSTRAK**

### **PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
ALFIANDRI**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan beralihnya pengelolaan pendidikan tingkat menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan tersebut memiliki konsekuensi, salah satunya adalah peralihan sumber daya manusia dan peralihan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Peralihan aset terutama aset berupa tanah harus diikuti dengan kewajiban pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan kantor pertanahan. Dalam rangka percepatan pendaftaran peralihan hak atas tanah aset pemerintah daerah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menggunakan mekanisme ganti nama.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menemukan dasar hukum pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung. (2) Menganalisis Kebijakan pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif dan empiris. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dasar hukum pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung adalah perintah Undang-Undang akan tetapi tidak ditemukan mekanisme peraturan pelaksanaanya (2) Terjadi kekosongan hukum terkait mekanisme pendaftaran peralihan hak atas tanah aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengambil kebijakan untuk segera mendaftarkan pengalihan aset melalui mekanisme ganti nama.

**Kata kunci : Aset Pemerintah Daerah, Pendaftaran Tanah, Ganti Nama.**

## **ABSTRACT**

### **REGISTRATION OF LAND RIGHTS TO LOCAL GOVERNMENT ASSETS AS A CONSEQUENCE OF THE TRANSFER OF AUTHORITY IN THE FIELD OF EDUCATION IN LAMPUNG PROVINCE (Study at Bandar Lampung City Land Office)**

**By  
ALFIANDRI**

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates the transfer of secondary education management from the district/city government to the provincial government. The transfer of authority has consequences, one of which is the transfer of human resources and the transfer of assets, both movable and immovable. The transfer of assets, especially support in the form of land, must be followed by land registration obligations which are the authority of the land office. In order to accelerate the registration of the transfer of rights to land assets of the regional government, the Bandar Lampung City Land Office uses a renaming mechanism.

The objectives of this study are: (1) Finding the legal basis for registration of land rights of local government assets as a consequence of the transfer of authority in the field of education in Lampung Province. (2) Analyze the policy of registering land rights to local government assets as a consequence of the transfer of authority in the field of education in Lampung Province. Research methods used normative and empirical approaches. The collected data are analyzed descriptively and qualitatively.

The results of this study show that: (1) The legal basis for registration of land rights to local government assets as a consequence of the transfer of authority in the field of education in Lampung Province is an order of the Law, but there is no mechanism for implementing regulations (2) There is a legal vacuum related to the registration mechanism for the transfer of rights to land assets owned by the Bandar Lampung City Government to the Lampung Provincial Government, The Head of the Regional Office of the National Land Agency of Lampung Province took a policy to immediately register the transfer of assets through a renaming mechanism.

**Keywords : Local Government Assets, Land Registration, Rename.**